

REAKSI SULTAN MUHAMMAD SIRAJUDDIN TERHADAP KONTRAK POLITIK KOLONIAL TAHUN 1886-1945

Oleh: Rivaldi Apryanto, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, apriantorian587@gmail.com

Abstrak

Reaksi Sultan Muhammad Sirajuddin di Kesultanan Dempo terhadap kontrak politik Kolonial adalah sebagai bentuk reaksi atas kebijakan politik Kolonial. Reaksi ini mengakibatkan Sultan harus diasingkan dan menjadikan Kesultanan Dempo bergabung dengan Kesultanan Bima. Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui reaksi Sultan Muhammad Sirajuddin terhadap kontrak politik Kolonial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya penandatanganan perjanjian kontrak antara Kesultanan Dempo dan VOC tahun 1669 menjadi awal dari kekuasaan kolonial di Dempo. Perjanjian tersebut masa Hindia-Belanda dilanjutkan sebagai kontrak politik panjang antara Belanda dan Sultan Muhammad Sirajuddin di Kesultanan Dempo tahun 1886 dan 1905, menimbulkan penentangan oleh Sultan Dempo. Hal ini berkaitan dengan isi kontrak yang menurutnya merugikan kesultanan. Atas reaksi Sultan ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh Belanda agar Sultan Dempo ini tunduk salah satunya menggunakan strategi politik *divide in empera* dalam pewarisan tahta. Strategi ini berhasil dan kemudian membuat Sultan Muhammad Sirajuddin diasingkan bersama kedua putranya. Pasca pengasingan dan meninggalnya Sultan, keadaan Kesultanan Dempo masa Jepang digabungkan dengan Kesultanan Bima hingga Kemerdekaan. Namun ketika Belanda kembali dan membentuk Negara Indonesia Timur (NIT), Kesultanan Dempo menuntut agar berotonomi kembali. Tuntunan ini diterima dengan dilantikannya Sultan serta dikembalikannya otonomi Kesultanan Dempo tahun 1947.

Kata kunci: Kesultanan Dempo, Sultan Muhammad Sirajuddin, Kontrak Politik Kolonial.

SULTAN MUHAMMAD SIRAJUDDIN'S RESISTANCE TOWARD THE POLITICAL CONTRACT DURING THE COLONIAL PERIOD IN 1886-1945

Abstract

*Sultan Muhammad Sirajuddin's resistance toward the political contract during the colonial period in the Sultanate of Dempo is a form of reaction toward the political policy exercised by the colonizers. This reaction resulted in him being exiled, and led to the unification of Dempo and Bima Sultanate. This study aims at revealing the resistance of Sultan Muhammad Sirajuddin toward the political contract during the colonial period in the Sultanate of Dempo. The result shows that there had been a sign of agreement between VOC and the Sultanate of Dempo which served as the beginning of colonialism in in Dempo. This agreement was signed in the Dutch East Indies period, and it continues as a long term agreement until the rule of Sultan Muhammad Sirajuddin in 1886-1905. However, later on the Sultan refused to follow the agreement because he realized that there are many policies that is not beneficial for the Sultanate. Because of this resistance, the colonizer applied many strategies to subdue the Sultan, and one of them is by using a strategy called *divide et impera* during the inheritance of the throne. This strategy successfully bring down the Sultan, and he was then exiled with his two sons. After the exile and the death of the Sultan, the Sultanate of Dempo in the Japanese period was unified with the Sultanate of Bima. However, when the Netherland came back, the Sultanate of Dempo demanded to regain its status as an autonomous Sultanate. This demand was accepted with the inauguration of the Sultan and the return of the Dempo Sultanate as an autonomous region.*

Keywords: The Sultanate of Dempo, Sultan Muhammad Sirajuddin's, Colonial Political Contract

PENDAHULUAN

Kabupaten Dompu merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara administratif Kabupaten Dompu berbatasan dengan wilayah sebelah barat Kabupaten Sumbawa, sebelah utara Laut Flores dan Kabupaten Bima, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bima dan Samudra Indonesia di sebelah selatan.¹ Kabupaten Dompu dahulunya merupakan kerajaan yang bernama Dompu. Kerajaan ini berdiri atas kesepakatan seluruh para *Ncuhi* (kepala suku) yang mendiami di setiap daerah-daerah baik pedalaman maupun pesisir. Keberadaan *Ncuhi* di Dompu sangat berpengaruh dalam berdirinya Kerajaan Dompu dan penentuan awal Raja Dompu. Berdasarkan cerita rakyat yang berkembang penentuan awal Raja Dompu bermula saat di wilayah Woja berkuasa seorang *Ncuhi* Kula (Sang Kula). Ia mempunyai anak perempuan bernama La Komba Rawe.

Cerita rakyat menyebutkan bahwa Putra Raja Tulang Bawang yang berasal dari wilayah Sumatera terdampar di daerah Woja dalam pengembaraannya, tepatnya di wilayah Woja bagian timur. Kemudian putra raja Tulang Bawang tersebut menikah dengan putri *Ncuhi* Kula. Pernikahan ini oleh para *Ncuhi* sepakat menobatkan putra raja Tulang Bawang sebagai Raja Dompu yang pertama. Setelah adanya seorang raja, Kerajaan Dompu berdiri sebagai kerajaan yang bercorak Hindu sehingga pada masa pemerintahan Dewa Mawa'a Taho (Raja ke-7) Dompu mengalami dua kali ekspedisi dari Majapahit yang mengakibatkan Dompu berada dalam naungan Majapahit.²

Kerajaan Dompu menerima Islam masuk sekitar tahun 1520 dengan Sultan pertama bernama Sultan Syamsuddin yang bergelar *Mawa'a Tunggu*, beliau merupakan putera dari Dewa Mawa'a Taho. Penyebaran Islam di Kerajaan Dompu oleh beberapa sumber seperti babad dan naskah kuno tersebar melalui

perdagangan, dakwah, dan perkawinan.³ Semenjak Islam hadir dan menjadi agama resmi kerajaan, maka keadaan tersebut menjadikan Kerajaan Dompu beralih menjadi Kesultanan Dompu yang memiliki semboyan yang berisi Adat bersendi Sara, Sara bersendi Hukum, Hukum bersendi Kitabullah.

Kedatangan Belanda di Kesultanan Dompu berawal dari kekalahan Sultan Hasanuddin atas VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) yang akhirnya mengharuskan menandatangani Perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Perjanjian ini menandai adanya perluasan monopoli perdagangan serta kekuasaan penuh Belanda di wilayah Indonesia Timur khususnya kerajaan di Pulau Sumbawa.⁴ Pada masa Pemerintahan Hindia-Belanda perjanjian masa VOC dirubah menjadi kontrak politik, sehingga keenam kesultanan dan kerajaan di Pulau Sumbawa ini masih terikat dengan kontrak politik tersebut yang membuat pengaruh kekuasaan kolonial di Pulau Sumbawa semakin kuat.⁵

Pada tahun 1971 Kesultanan Dompu memulai kontrak politik panjangnya (*large politic contract*) dengan Belanda yang ditandatangani oleh Sultan Abdullah II (Sultan ke-19). Kontrak politik panjang ini kemudian dilanjutkan oleh Sultan Muhammad Sirajuddin yang memerintah dari tahun 1886-1934, beliau dinobatkan sebagai Sultan pada tanggal 21 Oktober 1886. Ketika memerintah Sultan Muhammad Sirajuddin merubah berbagai aspek kehidupan di Kesultanan Dompu, seperti: aspek sosial, adanya penghapusan perbudakan dan stratanya dirubah serta budaya yakni mewajibkan pemakai *rimpu* (sejenis cadar) untuk wanita Dompu sebagai penegak syariat Islam di Kesultanan Dompu.

³Syarifuddin Jurdin, *Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2012), hlm. 2.

⁴Nuryahman, dkk, "Perjuangan Sultan Muhammad Sirajuddin menentang Belanda di Dompu tahun 1886-1934", dalam *Jurnal Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional* (Vol. 10, No. 32, 2009), hlm. 62.

⁵Siti Maryam R. Salahuddin, *Selintas Sejarah Pulau Sumbawa*, (Bima: Makalah pada Dialog Kesejarahan Dalam Rangka Lawatan Sejarah Sumbawa-Bima, 2003) hlm. 2.

¹Agus Suryanto, *Sejarah Kabupaten Dompu 11 April 1815*, (Dompu: Pemda Kabupaten Dompu, 2013), hlm. 69.

²*Ibid.*, hlm. 3-4.

Selama masa pemerintahan Sultan Muhammad Sirajuddin, ia menandatangani pembaharuan kontrak politik panjang tahun 1886 dan 1905. Akan tetapi pembaharuan tersebut justru membuat beliau tidak mematuhi dan menentang segala kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam kontrak politik panjang. Penentangan tersebut berdasarkan isi pokok kontrak, seperti: kerja rodi, membayar upeti dan peredaran candu yang menurut beliau kontrak itu sangat merugikan Kesultanan Dompo dan bertentangan dengan Syariat Islam yang diterapkan di Kesultanan Dompo.

Akibat sikap penentangan dari kebijakan kontrak politik panjang tersebut, Pemerintahan kolonial Belanda mengasingkan Sultan Muhammad Sirajuddin ke Kupang bersama kedua putranya yakni Abdul Wahab Sirajuddin (*Rumo Toi*) dan Abdullah Sirajuddin (*Rumo Goa*) tahun 1934. Pada tahun 1937 Sultan Muhammad Sirajuddin wafat di tempat pengasingannya. Pasca pengasingan dan meninggalnya Sultan Muhammad Sirajuddin, Kesultanan Dompo pada masa Pemerintahan Jepang digabungkan dengan Kesultanan Bima. Kondisi ini berlangsung hingga masa Kemerdekaan, namun ketika Belanda mencoba kembali masuk dengan mendirikan Negara Indonesia Timur (NIT) tahun 1946, Kesultanan Dompo berupaya untuk menuntut hak otonomi dan pada tahun 1947 otonomi Kesultanan Dompo kembali seutuhnya.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dalam studi sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis secara tertulis atau suatu prosedur dalam menyusun detail-detail yang telah disimpulkan dari dokumen-dokumen otentik menjadi suatu kisah yang saling berhubungan. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode sejarah kritis. Metode sejarah kritis terdiri dari empat tahap pokok yaitu Heuristik, Verifikasi, Interpretasi dan Historiografi. Heuristik merupakan proses pengumpulan atau menemukan sumber yang sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis. Tahap kedua yaitu verifikasi atau kritik sumber, yaitu upaya untuk mendapatkan otentisitas (keaslian sumber) dan kredibilitas (kebenaran sumber). Tahap ketiga yaitu interpretasi, yaitu penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang diperoleh dari sumber sejarah. Interpretasi

digunakan untuk mencari hal-hal yang saling berhubungan antara fakta yang satu dengan lainnya sehingga menjadi sebuah rangkaian fakta yang logis dan bermakna.⁶ Tahap keempat adalah historiografi atau penulisan sejarah. Historiografi merupakan tahap akhir dalam penelitian sejarah yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KONDISI UMUM KESULTANAN DOMPO SEBELUM KONTRAK POLITIK DENGAN HINDIA-BELANDA

Kerajaan Dompo merupakan kerajaan yang berdiri sekitar abad ke-9 dan terletak di tengah Pulau Sumbawa. Sebelum terbentuknya kerajaan di wilayah Dompo sudah dihuni oleh kelompok-kelompok masyarakat yang hidup berdasarkan aturan dalam kekuasaan para *Ncuhi* (kepala suku).⁷ Kekuasaan *Ncuhi* di Dompo mempunyai pengaruh yang cukup besar, salah satunya dalam proses pengangkatan raja. Proses tersebut ditentukan oleh para *Ncuhi* melalui kesepakatan seluruh *Ncuhi* dari bagian pedalaman sampai daerah pesisir pantai, oleh kesepakatan para *Ncuhi* inilah Kerajaan Dompo berdiri.⁸

Berdasarkan cerita rakyat (*mpama ro nuntu*) yang berkembang, awal raja pertama di Kerajaan Dompo berasal dari suatu negeri yang jauh (Pulau Sumatra). Dalam cerita rakyat menceritakan bahwa Sang Kula (*Ncuhi* Kula) mempunyai seorang putri bernama La Komba Rawe. Sang Kula menikahkan putrinya dengan putra raja Tulang Bawang (Sumatera) yang sengaja mengunjungi negeri-negeri di wilayah timur. Atas persetujuan para *Ncuhi*, putera raja

⁶Suhartono W Pranoto, *Teori & Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.35.

⁷Pada masa *Ncuhi*, masyarakat telah melakukan aktivitas seperti: mulai merintis pertanian, peternakan serta tatanan sosial. Dalam kepemimpinan *Ncuhi* terdapat dua lembaga yang mengatur kehidupan, yakni *Ncuhi* sebagai kepala pemerintahan dan masyarakat sebagai anggota. Lihat M. Hilir Ismail, *Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara*, (Mataram: Lengge, 2004), hlm. 24-26.

⁸Muhammad Ruslan, *Prespektif Kebangkitan Kesultanan Dompu*, (Dompu: Yayasan Kesultanan Dompu, 2017), hlm. 3.

Tulang Bawang diangkat menjadi raja Dampo pertama yang beristana di daerah Tonda, Woja.⁹

Selama pendiriannya Kerajaan Dampo merupakan kerajaan Hindu yang terletak di Tonda, Woja. Pada masa kerajaan kehidupan perekonomian masyarakat Dampo berasal dari hasil pertanian dan perdagangan. Perdagangan dilakukan dengan Bangsa Cina melalui sistem barter. Keberadaan Kerajaan Dampo di timur Nusantara terpendang cukup kuat dan tua. Hal ini dibuktikan ketika Gajah Mada, Patih Mangkubumi Majapahit menyebutkan nama Dampo dalam Sumpah Palapa tahun 1331. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kutipan Muhammad Yamin:

Saya baru akan berhenti berpuasa makan palapa, jikalau seluruh Nusantara bertakluk dibawah kekuasaan negara; jikalau Gurun, Seram, Tanjungpura, Haru, Pahang, Dampo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik sudah dikalahkan.¹⁰

Peristiwa penaklukan Dampo oleh Majapahit dikenal dengan Ekpedisi Padampo. Ekpedisi Padampo dipimpin oleh Gajah Mada disertai oleh laksamana sang Wiramandalika Pu Nala.¹¹ Pada masa pemerintahan Dewa Mawa'a Taho (Raja Dampo ke-7), ekpedisi pertama Majapahit dilancarkan sekitar tahun 1340 yang dipimpin oleh Wiramandalika Pu Nala.¹² Ekpedisi ini dibantu oleh Panglima Pasunggerigis dari Laskar Bali, namun penaklukan dari ekpedisi pertama mengalami kekalahan dari Majapahit. Pada tahun 1357 Kerajaan Dampo yang masih di bawah pemerintahan Dewa

Mawa'a Taho mengalami serangan kembali dari Majapahit. Ekpedisi ini dipimpin langsung oleh Laksamana Gajah Mada dan Panglima Mpu Nala. Selain itu, ekpedisi ini dibantu oleh Laskar Bali di bawah pimpinan Panglima Soko.¹³ Perang dimenangkan oleh Majapahit yang menandakan ekpedisi kedua ini berhasil menaklukan Dampo dan akhirnya bernaung di bawah kekuasaan Majapahit. Pemerintahan Kerajaan Dampo tetap berada di bawah kekuasaan Majapahit sampai masuknya Islam di Dampo.

Islam di wilayah Dampo berdasarkan dari dua pendapat yang menjelaskan mengenai awal mula penyebaran Islam sampai di wilayah Dampo. Pendapat mengenai awal masuk dan penyebaran Islam tersebut antara lain: pertama, berdasarkan catatan lama Kesultanan Bima yang menggunakan Bahasa Arab-Melayu disebut *BO' Sangaji Kai*. Islam masuk ke Dampo ditahun 1028 H/1608 M bersamaan dengan Bima yang membawa pertama kali ialah orang-orang dari Sulawesi Selatan, hal ini berdasarkan penjelasan dalam tulisan M Ridwan.¹⁴

Pendapat kedua mengenai penyebaran Islam di wilayah Dampo, ialah oleh seorang ulama terkemuka keturunan Arab-Magribi yang bernama Syeikh Nurdin. Kedatangannya pertama kali di Wilayah Dampo tahun 1520 untuk menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Pada saat itu, Kerajaan Dampo dibawah pemerintahan Raja Dewa Mawa'a Taho (raja ke VII) yang masih bercorak Hindu. Kehadiran Syeikh Nurdin di Kerajaan Dampo tampaknya mendapat simpati dari rakyat, terutama Raja

⁹Abdul Malik Hasan, *Memikirkan Makna Dompou dalam Rangka Mencari Identitasnya: sebuah refleksi hermeneutik*, (Yogyakarta: Yayasan Nuansa Nusa, 2008), hlm. 7.

¹⁰Muhammad Yamin, *Gajah Mada: Pahlawan Persatuan Nusantara*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1972), hlm. 50.

¹¹Teguh Panji, *Kitab Sejarah Terlengkap Majapahit*, (Yogyakarta: Laksana, 2015), hlm. 151.

¹²Agus Aris Munandar, *Gajah Mada: Biografi Politik*, (Depok: Komunitas Bambu, 2010), hlm. 102.

¹³M. Saleh, *Sekitar Kerajaan Dompou*, (Dompou: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Dompou, 1985), hlm. 49.

¹⁴Bahwa saudara Daeng Mangalai yang bertempat tinggal di Bugis datang bersama utusan Raja Luwu, Tallo dan Bone. Mereka berempat datang untuk berdagang dan dijadikan pula untuk menjadi guru agama Islam di Bima. Mereka membawa surat Daeng Malaba dari Bugis, untuk adiknya yang memimpin wilayah Sape (Bima), bernama Raja Ruma Jena Jara inilah yang pertama kali memeluk Islam. Kedua ialah Ruma Bicara La Mbila, ketiga Manuru Bata Dampo, dan keempat ialah La Ka'i. Lihat M. Ridwan, *Sejarah Masuknya Islam dan Perkembangannya dalam masa Kesultanan di Dompou*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1986), hlm. 35.

Dompo. Perlahan-lahan ajaran Islam yang dibawa oleh Syekh Nuridin dapat cepat diterima oleh rakyat Kerajaan Dompo, termasuk dari bangsawan.¹⁵

Islam menjadi agama resmi Kerajaan Dompo ketika putra pertama Dewa Mawa'a Taho, La Bata Na'e naik tahta menggantikan ayahandanya. Guna memperdalam agama Islam, La Bata Na'e pergi meninggalkan Dompo untuk menimba ilmu di Kerajaan Gowa-Tallo (Makassar) dan bahkan sampai ke tanah Jawa. Setelah menguasai berbagai macam ilmu agama Islam, La Bata Na'e akhirnya kembali ke Kerajaan Dompo dan meneruskan kembali kepemimpinannya. La Bata Na'e ini resmi naik tahta sekitar tahun 1528, selanjutnya ia mengubah sistem pemerintahan di Dompo dari kerajaan beralih menjadi kesultanan.

Kedatangan VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) di Kesultanan Dompo, telah dimulai ketika Perjanjian Bongaya merupakan salah satu bukti keberhasilan kolonial dalam menjalankan politik *divide et empera* di wilayah Indonesia Timur. Awal mulanya diadakan perjanjian tersebut, saat Aru Palaka (Raja Bone) bersama Bangsawan Bugis lainnya melakukan perlawanan terhadap Sultan Hasanuddin (Raja Gowa), mengingat saat itu Kerajaan Bone merupakan wilayah yang berada di bawah kekuasaan Gowa.¹⁶ Kemudian perlawanan ini dimenangkan oleh Aru Palaka dan VOC di bawah pimpinan Speelman.

Kerajaan-kerajaan di Pulau Sumbawa berada dalam pengawasan Residen Timor di Kupang, diwakili Gubernur *Celebes*¹⁷ di Makassar. Penandatanganan Perjanjian Bongaya 1667, menandai pengaruh kekuasaan VOC di wilayah Pulau Sumbawa, termasuk Kesultanan Dompo. Pasca perang tersebut Sultan Dompo

meminta maaf kepada pihak Belanda. Pihak Belanda kemudian menerima permintaan maaf dari Sultan Dompo dan menyodorkan perjanjian awal dengan Kesultanan Dompo yang disahkan tanggal 11 Oktober 1669 di Benteng Rotterdam.¹⁸

Pada masa Hindia Belanda tahun 1840-an untuk perekonomiannya Kesultanan Dompo berdasarkan pada kondisi alam yang ada layaknya kerajaan-kerajaan pribumi di wilayah lain. Sektor ekonomi tersebut menjadi penopang tegak dan bertahnya Kesultanan Dompo dan warganya sebagai suatu kesatuan wilayah. Bidang utama yang ditekuni oleh masyarakat Dompo ialah pertanian, yang ditanam di sawah dan ladang adalah padi sebagai tanaman pangan penduduk. Adapun bidang peternakan, yakni kuda dan sapi sebagai komoditi ekspor serta hasil hutan: kayu cendana, lilin, kayu kuning, madu sebagai komoditi cukup laku dan hasil laut: kerang mutiara.¹⁹

Pada tahun 1850-an, Kesultanan Dompo mulai menjadikan Islam sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan. Oleh sebab itu, Kesultanan Dompo memiliki semboyan yang sangat kental dengan Islam ialah "hadat bersendi syara', syara' bersendi hukum, dan hukum bersendi kitabullah". Adapun beberapa pejabat-pejabat yang menjalankan pemerintahan di Kesultanan Dompo, di antaranya: Sultan sebagai kepala kesultanan sekaligus pimpinan pemerintahan. Sultan dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh majelis *rato* atau pejabat pemerintahan yang terdiri dari *ruma bicara* (wazir/perdana menteri), *rato rasana'e* (menteri koordinator wilayah sebelah timur), *rato dea* (menteri koordinator wilayah sebelah barat). Terdapat juga *rato parenta* (menteri dalam negeri) dan *rato renda* (menteri pertahanan).²⁰

¹⁵M. Fachrir Rahman, *Islam di Nusa Tenggara Barat: Proses Masuk dan Penyebarannya*, (Mataram: Alam Tara Learning Institute, 2012) hlm. 97.

¹⁶Perjanjian Bongaya dikenal juga sebagai perjanjian atas perdamaian dari Perang Makassar. Lihat Sagimun, *Sultan Hasanuddin Menentang V.O.C* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986), hlm. 147-149.

¹⁷*Celebes* sebutan Pulau Sulawesi masa Kolonial Belanda.

¹⁸Manggaukang Raba, Mars Anshory wijaya, *Dompu: Dulu, Kini dan Esok* (Dompu: Pemerintah Kabupaten Dompu, 2002), hlm. 33.

¹⁹Muhammad Ilyas, "Reaksi Kesultanan Dompo terhadap Politik Kolonial Belanda", *Tesis* (Yogyakarta: Pascasarjana UGM, 2012), hlm. 39-40.

²⁰Nuridin Saleh, M. Yusuf Jamaluddin, dkk, *Dompu Selayang Pandang: tempo dulu, sekarang dan cita-cita mendatang*, (Dompu: KNPI Dompu, 1984), hlm. 10-11.

Terdapat juga majelis agama yang terdiri dari imam (menteri agama), qadhi (menteri pengadilan agama), *labe nae* (pemimpin kegiatan keagamaan), dan khatib (petugas pencatat peradilan). Dalam wilayah Kesultanan Dampo dibagi dalam beberapa *jeneli* (distrik/kecamatan) yang dikoordinator *tureli* dan tugasnya dibantu oleh *bumi na'e*. Adapula pejabat lain seperti: *gelarang* (kepala desa), *bumi jara* (pengurus kuda kerajaan), *sarian* (bagian keamanan sampai di seluruh pelosok kerajaan) dan sebagainya. Selain itu, adapun majelis hadat yang bertugas untuk pemberi pertimbangan, wewenang dalam mengangkat dan memberhentikan sultan dan bertanggung jawab dalam hubungan dengan Belanda. Terdapat juga syara' yang beranggota majelis agama.²¹ Syara' memiliki pengadilan untuk mengatur dan memutuskan perkara mengenai perkawinan, perzinahan, perkawinan haram dan warisan.

Terbentuknya susunan pemerintahan Kesultanan Dampo menandai adanya pembagian pelapisan masyarakat (strata sosial) di Kesultanan Dampo, sehingga pada tahun 1855 Kesultanan Dampo menerapkan pembagian pelapisan masyarakat. Pembagian tersebut dibagi menjadi empat lapisan, yakni: pertama, *ruma* atau sultan, keturunan raja-raja. Kedua *dae* atau rato yakni para bangsawan, Ketiga *dou ma mboto* atau penduduk asli serta *dou dari* yang merupakan kaum pendatang yang telah menjadi penduduk asli. Terakhir keempat, *dou ada* atau kaum budak, adalah golongan lemah.²²

Pada masa Hindia-Belanda kelanjutan perjanjian yang ditandatangani antara Kesultanan Dampo dan VOC berubah menjadi kontrak politik. Kontrak politik panjang (bagi wilayah yang besar), dan kontrak politik pendek (bagi wilayah yang kecil).²³ Perjanjian/kontrak ini diadakan antara Pemerintah Hindia-Belanda dengan pemerintahan kerajaan yang harus diperbaharui oleh setiap sultan/raja yang memerintah. Pemerintah Hindia-Belanda yang

berada di wilayah kerajaan hanya sebagai perwakilan dari Pemerintah Hindia-Belanda dengan ketentuan harus menghormati dan menjaga hak kewajiban sultan yang memiliki wilayah.

Kesultanan Dampo dalam urusan administrasi seperti penyetoran uang pajak, ditetapkan bersamaan dengan Kesultanan Bima berupa *gekomiterden kas* yang berkedudukan di Bima. Sampai pada abad ke-20 Kesultanan Dampo masih terikat dengan kontrak Hindia-Belanda. Kontrak tersebut merupakan kontrak politik panjang yang ditandatangani oleh Sultan Abdullah II (Sultan ke-19) tahun 1871 yang kemudian dilanjutkan oleh Sultan Muhammad Sirajuddin (Sultan ke-20) untuk meneruskan kontrak tersebut.²⁴

B. SULTAN MUHAMMAD SIRAJUDDIN DAN PENENTANGANYA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KOLONIAL

Sultan Muhammad Sirajuddin dilahirkan di Dampo tanggal 18 Maret 1847, dan wafat di Kupang pada tanggal 14 Februari 1937 dalam usia 87 tahun (ditempat pengasingan). Semasa kecil sampai remaja, Sultan Muhammad Sirajuddin diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan istana, serta mendapat pendidikan dan ilmu agama di istana. Hal ini tidak serta-merta membuat beliau dimanjakan walaupun ia merupakan *ruma to'i*²⁵ kesultanan selanjutnya. Sultan Muhammad Sirajuddin merupakan putra dari Sultan Abdullah II yang mangkat karena sakit, kemudian untuk menggantikan ayahnya, Sultan Muhammad Sirajuddin dinobatkan sebagai Sultan Dampo ke-20 atau raja ke-28 di Kesultanan Dampo pada umur 38 tahun pada tanggal 21 Oktober 1886.

Sultan Muhammad Sirajuddin memiliki empat istri, di antaranya: istri pertama bernama

²⁴Khaerul Muslim, *Nasionalisme Sultan Muhammad Sirajuddin "Manuru Kupang"* (Mataram: Makalah Seminar Budaya tentang Usulan Pahlawan Nasional, 2013), hlm. 4.

²⁵*Ruma to'i* merupakan proses penobatan putra mahkota atau raja muda yang telah resmi diangkat oleh hadat dan hukum Kesultanan Dampo. Lihat Muhammad Chaidir, *Kronik Dampo: Catatan Sejarah Dampu*, (Dampu: Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Dampu, 2008), hlm. 41-43.

²¹Siti Maryam Salahuddin, *Sejarah Pemerintahan Adat Kesultanan Bima*, (Bima: Yayasan Museum Sampraja, 2014), hlm. 22.

²²Khaerul Muslim, *Dou (Manusia) Dampu*, (Mataram: Yayasan Suara Alam, 2001), hlm. 6.

²³I Ketut Ardhana, *Penataan Nusa Tenggara pada masa Kolonial 1915-1950*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 126.

Siti Kemalasar sebagai permasuri namun tidak memiliki keturunan. Istri kedua Siti Azizah (*djaju na'e*), memiliki empat orang anak, yakni: Abdul Wahab (*ruma toi*), Siti Fatimah (*ruma tari*), Siti Mariam (*ruma tene*), dan Abdullah (*ruma goa*). Istri ketiga Hadijah (*djaju to'i*), memiliki seorang putri bernama Siti Aisyah (*ruma tau*). Istri terakhir Hafisah tanpa keturunan.²⁶

Pada tahun 1886, Sultan Muhammad Sirajuddin memerintah di Kesultanan Dempo, menjadikannya Sultan Muhammad Sirajuddin menandai kontrak politik lama antara Kesultanan Dempo dan Pemerintah Hindia-Belanda tahun 1871 masih dilanjutkan, namun sebagai Sultan Dempo, ia tidak begitu saja tunduk serta patuh terhadap kontrak politik tersebut. Sikap Sultan Muhammad Sirajuddin membuat Pemerintah Hindia-Belanda memperbaharui kembali kontrak itu dengan diwakili oleh Daniel van Braam Morris.

Kontrak tersebut antara lain berisi mengenai pemakluman bahwa Sultan Dempo dan menteri-menterinya harus senantiasa menjaga perdamaian serta persahabatan dengan Pemerintahan Hindia-Belanda maupun kerajaan yang lain di bawah naungan Pemerintah Hindia-Belanda. Pemerintah Hindia-Belanda juga berhak mencabut hak Sultan Dempo sebagai kepala pemerintahan serta pengangkatan sultan baru dan atau kematian seorang Sultan harus diberitahukan ke Gubernur *Celebes*. Sultan Dempo juga berjanji akan mengatur pemerintahan di Kesultanan Dempo dengan persetujuan oleh Gubernur *Celebes*.²⁷

Kontrak politik ini merupakan kontrak pertama Sultan Muhammad Sirajuddin dan Pemerintah Hindia-Belanda yang ditandatangani 21 Oktober 1886. Akan tetapi sikap Sultan Muhammad Sirajuddin masih tidak patuh terhadap kontrak itu. Sikap Sultan Muhammad Sirajuddin, membuat Pemerintah Hindia-Belanda menyerahkan kembali pembaharuan kontrak politik panjang yang dibuat 31 Desember 1905

dengan diwakili oleh Henrij de Vogel Matheu Henrizoon sebagai utusan dari Gubernur *Celebes*. Kontrak politik ini mencakup beberapa inti perihal antara Pemerintah Hindia-Belanda yang diwakili oleh Gubernur *Celebes* dengan Kesultanan Dempo yang menyatakan bahwa Sultan dan menteri harus mengakui bahwa tanah kesultanan ini adalah milik Pemerintah Hindia-Belanda. Sultan juga harus berjanji untuk setia dan patuh serta mengakui Ratu Belanda sebagai pemilik kekuasaan yang mutlak.²⁸

Selain itu, Sultan harus memberikan perizinan jika Gubernur *Celebes* mendirikan kantor wakil asisten residen, atau benteng di Kesultanan Dempo. Sultan juga harus membiayai pendirian kantor atau perusahaan tersebut, serta memberikan bantuan berupa pekerja dari rakyatnya.²⁹ Mengenai hak untuk pemberian izin sewa untuk melakukan eksplorasi pertambangan, perizinan untuk reklamasi, pendirian perusahaan pertanian, dan pemanfaatan hutan di wilayah Kesultanan Dempo sepenuhnya berada ditangan Pemerintah Hindia-Belanda. Sultan dan menteri-menterinya tidak akan memungut pajak apapun kecuali dengan izin Pemerintah Hindia-Belanda.³⁰ Gubernur *Celebes* mengeluarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk Sultan, yakni: memasukkan dan membawa barang-barang senjata api, peluru, amunisi (bom dan granat) serta perdagangan candu dan minuman keras.³¹

Menyetujui kontrak politik panjang bukan berarti Sultan Muhammad Sirajuddin langsung mematuhi isi perjanjian tersebut. Sultan memberikan reaksi berupa sikap penentangan atas isi kontrak politik panjang yang dinilainya sangat merugikan Kesultanan Dempo. Penolakan Sultan ini ditunjukkan melalui sikapnya yang tidak pernah menaati setiap perjanjian dalam kontrak tersebut. Selanjutnya penentangan Sultan Muhammad Sirajuddin terhadap kontrak politik itu mengenai pengaruh dominasi kekuasaan Pemerintah Hindia-Belanda di wilayah

²⁶Yusuf Jamaluddin, *Usulan Muhammad Sirajuddin menjadi Calon Pahlawan Nasional*, (Dempu: tidak diterbitkan, 2014), hlm. 3-4.

²⁷ANRI, *Kontrak-kontrak Raja-raja di Nusantara dengan Pemerintahan Hindia-Belanda*, No. 300, tahun 1886. Periksa pasal 4, 7, 10 dan 12, hlm 5, 9, 15 dan 19.

²⁸ANRI, *Kontrak-kontrak Raja-raja di Nusantara dengan Pemerintahan Hindia-Belanda*, No. 304, tahun 1905. Periksa pasal 1 dan 4, hlm. 2-4.

²⁹ *Ibid.*, periksa pasal 9 dan 11, hlm. 6-7.

³⁰ *Ibid.*, periksa pasal 14 dan 15, hlm. 9-10.

³¹ *Ibid.*, hlm. 18.

Kesultanan Dampo yang menurutnya terlalu sewenang-wenang. Hal tersebut ditunjukkan dengan segala bentuk perizinan, seperti eksplorasi tambang, reklamasi, perusahaan pertanian, dan pemanfaatan hutan di wilayah Dampo harus melalui persetujuan Gubernur *Celebes*.

Belanda juga turut ikut andil dalam memutuskan hukuman bagi rakyat Dampo. Kontrak itu juga mewajibkan Sultan Muhammad Sirajuddin untuk melakukan penyetoran hasil pajak ke kantor kas daerah di Kesultanan Bima, rupanya hal itu tidak pernah ia patuhi. Sultan menilai penarikan pajak yang dibebankan ke Kesultanan Dampo dan rakyatnya cukup besar. Hal ini membuat Sultan tidak pernah menyetor hasil pajaknya, melainkan hasil pajak tersebut Sultan gunakan sebagai penyimpanan untuk pendapatan di Kesultanan Dampo.

Semenjak saat itu Belanda seperti kehilangan akal untuk menundukkan Sultan Muhammad Sirajuddin.³² Akhirnya Belanda mengetahui cara agar Sultan Dampo itu mau tunduk yakni dengan strategi politik *divide in impera* (politik adu domba), mengingat Sultan Muhammad Sirajuddin sangat dekat dengan rakyatnya. Sehingga strategi politik *divide in impera* dinilai pasti berhasil untuk menundukkan Sultan Dampo. Keberhasilan politik ini ditandai dengan terlibatnya Belanda dalam pewaris putra mahkota. Sehingga Belanda memunculkan perselisihan yang membuat Sultan Muhammad Sirajuddin harus berunding yang akhirnya membuat Sultan Dampo ini diasingkan.

Selain penentangannya terhadap kebijakan Kolonial, Sultan Muhammad Sirajuddin memiliki peranan yang cukup penting bagi kehidupan di Kesultanan Dampo yakni: perubahan status golongan budak di Kesultanan Dampo, Adanya perdagangan budak khususnya di Pulau Sumbawa tentu memunculkan perubahan pada sistem sosial masyarakat di Pulau Sumbawa. Namun berbeda dengan yang diterapkan oleh Sultan Muhammad Sirajuddin di Kesultanan Dampo, ketika ia memerintah justru budak yang sebenarnya dipandang sebagai komoditi perdagangan, olehnya dihapuskan.³³ Penghapusan perbudakan

di Kesultanan Dampo oleh Sultan, karena beliau berpendapat bahwa budak bukan untuk diperdagangkan apalagi dipekerjakan dengan secara paksa. Melainkan budak seharusnya diperlakukan selayaknya sebagai rakyat biasa yang memiliki martabat sehingga strata sosial budak di Dampo dihapuskan dari golongan *ada digabungkan dengan golongan dou ma mboto dan dou dari* (penduduk asli dan kaum pendatang).

Adapun peranan selanjutnya yakni *rimpu* sebagai simbol penegakkan Syariat Islam di Kesultanan Dampo. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Sirajuddin tahun 1911, ia menyerukan kepada seluruh rakyatnya agar mereka mematuhi hukum dan aturan sesuai syariat Islam yang telah diberlakukan.³⁴ Aturan tersebut, misalnya kaum wanita diharuskan agar mau menutup auratnya seperti yang telah diajarkan dalam Al-Qur'an, bahwa seorang wanita harus bisa menjaga diri dengan cara menutup aurat. Sultan dalam anjurannya tersebut mewajibkan wanita di Kesultanan Dampo agar memakai *rimpu* untuk menutup auratnya sebagai simbol penegakkan syariat Islam.³⁵

C. DOMPO PASCA PENGASINGAN DAN MENINGGALNYA SULTAN MUHAMMAD SIRAJUDDIN

Pada tahun 1932 memasuki usianya yang telah uzur, Sultan Muhammad Sirajuddin berencana yang menggantikan tahta kesultanan kelak ialah putra pertamanya Abdul Wahab Sirajuddin. Sultan pun mengirimkan surat penggantian kepada Gubernur *Celebes* di Makassar sebagai perwakilan Pemerintah Hindia-Belanda. Belanda yang mengetahui rencana Sultan tersebut melalui surat yang dikiriminya, membuat Belanda mengetahui cara agar menaklukkan Sultan Dampo itu melalui keterlibatan dalam pergantian Sultan Dampo.³⁶

[h/nuryahman.pdf](http://nuryahman.pdf), diakses 08 Agustus 2018, pukul. 10.00

³⁴Siti Lamusiah, "Estetika Budaya Rimpu Pada Masyarakat Bima", dalam *Jurnal Media Bina Ilmiah*, (Vol.7, No. 3, 2013), hlm. 18-19.

³⁵Siti Maryam Salahuddin, *Tenunan dan Wanita Bima*, (Mataram: Lengge, 1997), hlm. 29.

³⁶Kisman Pangeran, *Dari Kontrak Panjang hingga Musnahnya Istana dari Rakyat: Kisah Sultan Muhammad Sirajuddin menentang Kompeni*, (Bogor: Morinawa, 2013), hlm. 2-3.

³²Kaharul Zaman, "Sosok Keperkasaaan Sultan Muhammad Sirajuddin sebagai seorang Syuhada Dampu", *KILAS*, 10 Maret 2009, hlm. 11.

³³"Perdagangan Budak di Nusa Tenggara Sampai Pada Abad ke-19", <http://www.geocities.ws/konferensinasionalsejara>

Belanda beralasan bahwa ia masih berpegangan pada isi kontrak politik sebagai landasan dan berhak untuk ikut campur dalam persoalan pergantian Sultan Dampo. Belanda memanfaatkan keterlibatannya dalam penobatan ini dengan memakai strategi politik *divide et impera*, sebagai cara untuk memecah belah serta tipu muslihat agar dapat menguasai Kesultanan Dampo. Strategi politik Belanda ini digunakan untuk memihak putra sultan yakni Abdullah Sirajuddin sebagai pewaris Sultan Dampo selanjutnya.

Keberpihakan serta pengaruh politik *divide et impera* Belanda menimbulkan perselisihan antara kedua pewaris. Perselisihan tersebut terjadi saat Abdullah yang terhasut oleh dukungan Belanda menentang Abdul Wahab untuk menjadi Sultan Dampo sehingga situasi di keluarga istana hampir berakibat fatal. Langkah yang ditempuh Sultan untuk meredakan situasi dengan menasehati kedua putranya agar tidak terpengaruh oleh Belanda. Keadaanpun kembali tenang, namun meredamnya situasi ini dimanfaatkan Belanda untuk menyusun rencana perundingan. Perundingan ini merupakan tipu muslihat Belanda agar dapat menurunkan Sultan Muhammad Sirajuddin dari jabatannya sebagai Sultan. Perundingan ini membahas persoalan pewarisan serta hubungan antara Belanda dan Kesultanan Dampo.

Melalui surat keputusan 15 Januari 1934, yang menyatakan bahwa Sultan Muhammad Sirajuddin diturunkan dari kedudukannya sebagai Sultan Dampo, serta Sultan dan kedua putranya Abdul Wahab dan Abdullah diasingkan ke Kupang sebagai tahanan politik. Status Sultan Muhammad Sirajuddin sebagai tahanan politik tidak lain karena pelanggaran yang ia perbuat, yakni tidak mematuhi perjanjian yang tertera dalam kontrak politik panjang yang telah disepakati serta sikap penentangan yang Sultan perbuat atas kontrak tersebut.³⁷

Pada tanggal 20 Februari 1934, Belanda kemudian menyerahkan pemerintahan atas wilayah di Dampo kepada *Zelfbestuure Commissie* (komisi pemerintahan) yang terdiri dari Muhammad Saleh sebagai *Jeneli* Dampo dan Ahmad sebagai *Jeneli* Kempo. Sementara itu sebagai pimpinan komisi ini, ditepatkan kontrolir

Belanda yang berkedudukan di Bima. Pertimbangan berikutnya Pemerintah Hindia-Belanda akan menyerahkan kekuasaan Dampo kepada Muhammad Tajul Arifin sebagai putra dari Abdul Wahab, putra sulung Sultan Muhammad Sirajuddin. Meskipun dia tidak meneruskan sekolahnya di OSVIA (*Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren*), namun atas tekanan dari Sultan Bima dan para bangsawan Dampo pencalonnya sebagai Sultan disetujui. Selama belum dilakukan pelantikan dan pengukuhan, Belanda tetap membiarkan pemerintahan dipegang oleh *Jeneli* Dampo dan Kempo yang berada dalam pengawasan kontrolir Bima.³⁸

Masuknya Jepang di Dampo sangat ditunggu-tunggu kehadirannya oleh masyarakat. Masyarakat juga menyambut gembira disertai dengan upacara penyambutan selamat datang kepada Jepang. Awal kedatangan Jepang di Dampo ini, bermula saat pendaratan pasukan angkatan laut Jepang dibawah pimpinan Kolonel Saito di Pelabuhan Bima tanggal 17 Juli 1942.³⁹ Ketika mendarat di Bima, Jepang membuat surat perjanjian dengan Kesultanan Bima tanggal 11 Mei 1942 yang memutuskan bahwa Kesultanan Dampo harus bergabung didalam Kesultanan Bima. Keputusan Jepang ini seperti yang dikutip yaitu:

Mengingat bahwa menoeoet Soerat-Perdjandjian jang diboeat oleh Pemerintah Keradjaan Dai-Nippon dengan Keradjaan Bima pada tanggal 11 Mei 2602, diantaranya terjatalah kepoetosan Pemerintah Dai-Nippon bahwa Keradjaan Dompoe, masoek didalam Kerdjaan Bima. Maka kami jang bertanda tangan dibawah ini: Djeneli2, Gelarang2, Kepala2 dan orang2 berpangkat dalam Keradjaan Dompoe, mengakoe dan berdjandji dengan sesoenggoehnja dan benar, bahwa kami akan menerima dan mendjoendoeng segala

³⁸Muhammad Ilyas, *op.cit.*, hlm. 115-116.

³⁹Nuryahman, "Pendudukan Jepang di Bima pada tahun 1942-1945, dalam Jurnal Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional, (Vol. 7, No. 26, 2007), hlm. 26.

³⁷"De Sultan van Dompoe", *Bataviaasch Nieuwsblad*, 28 Februari 1934

Titah dan Perintah jang diberikan oleh Pemerintah Keradjaan Bima...⁴⁰

Pergabungan Dampo dan Bima berlangsung hingga masa Kemerdekaan, namun pasca Kemerdekaan Indonesia, Belanda kembali ke Indonesia dengan diboncengi *Allied Forces Netherlands East Indies* (AFNEI). Belanda ingin menguasai Indonesia kembali akan tetapi mendapatkan perlawanan dari rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, diadakanlah perundingan Hooge Valuwe di Belanda yang delegasi Belanda diwakili oleh Van Mook, sementara delegasi Indonesia oleh Mr. Suwandi, dr. Sudarsono, dan Mr Abdul Karim. Namun perundingan yang berlangsung selama 2 hari (14-15 April 1946) ini mendapatkan kebuntuan, karena Belanda hanya mengakui Republik Indonesia secara *de facto* atas Jawa, Madura dan Sumatra.⁴¹ Van Mook mulai mengambil suatu gagasan untuk mengadakan perundingan-perundingan dengan pemimpin-pemimpin di Timur Besar (*Grote Oost-Indonesia Timur*) dan Kalimantan untuk menyusun suatu struktur ketatanegaraan baru.⁴² Gagasan Van Mook ini ternyata dapat terwujud sehingga digagaslah suatu bentuk pertemuan besar yang dikenal dengan Konferensi Malino.

Konferensi Malino berlangsung dari tanggal 16-25 Juli 1946 yang bertempat di Malino, Makassar (Sulawesi Selatan). Konferensi ini menjadi langkah awal politik federal Belanda. Sebagai tindak lanjut dari Konferensi Malino, maka diadakan Konferensi Denpasar pada tanggal 7-24 Desember 1946. Pembicaraan pada Konferensi Denpasar terfokus terhadap masalah pokok yakni pembentukan dan susunan ketatanegaraan di wilayah Timur Besar sehingga hasil dari Konferensi Denpasar ialah terbentuknya Negara Indonesia Timur (NIT) tanggal 24 Desember 1946 dengan presiden pertamanya

bernama Tjokorda Gede Raka Sukawati yang ibukotanya berkedudukan di Makassar.⁴³

Adanya Konferensi Denpasar membuka peluang bagi Dampo untuk menuntut pemulihan statusnya sebagai kesultanan yang berotonomi, mengingat pada masa Jepang status Dampo masih dalam naungan Bima hingga masa kemerdekaan. Pada tanggal 10 November 1946 diadakanlah musyawarah dalam pertemuan guna membahas persoalan ini. Pertemuan ini bertempat di Sekolah Melayu di Dampo yang dipimpin oleh WFH. Plas sebagai pejabat kontrolir dari Asisten Residen (AR) Sumbawa. Selain itu dihadiri pula oleh Sultan Muhammad Kaharuddin III (Sultan Sumbawa), hadat dan hukum, Muhammad Tahir (*Jeneli Dampo*) Achmad (*Jeneli Kempo*), serta beberapa bangsawan Dampo dan rakyat.⁴⁴ Pembahasan pada pertemuan ini mengenai masalah pergabungan Dampo dengan Bima semasa Jepang yang membuat perekonomian, hadat, hukum dan bahasa menjadi sama. Atas dasar inilah perwakilan dan rakyat Dampo yang hadir meminta kepada AR Plas selaku perwakilan Belanda untuk menyampaikan keinginan mereka ke Pemerintah Agung. Keinginan tersebut agar Dampo yang semasa Jepang digabung dengan Bima supaya dihapuskan sehingga dapat kembali menjadi kesultanan yang berdiri sendiri dengan dipimpin oleh putra Dampo yang bergelar Sultan Dampo.

Keinginan untuk berpisah ini oleh Tuan AR Plas, meminta agar hadat dan hukum untuk mempertimbangkan kembali keinginan rakyat Dampo. Sebab hal ini berhubungan dengan susunan ketatanegara yang telah disampaikan di Konferensi Malino bahwa disetiap daerah harus bekerja sama. Oleh sebab itu, Tuan AR Plas mengusulkan agar Dampo dapat bekerja sama (*gecombineerde landschappen*) dengan Bima. Dalam arti kerjasama ini Dampo telah terpisah dari gabungan dengan Bima hanya saja segala tata usaha untuk kemajuan dan kemakmuran

⁴⁰*Arsip Kesultanan Bima*, Surat Perjanjian antara Kesultanan Bima dan Pemerintahan Dai-Nippon. 5 September 2602.

⁴¹Ide Anak Agung Gede Agung, *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1985), hlm. 32.

⁴²Rahmatul Awal, "Negara Indonesia Timur tahun 1946-1950", *Skripsi* (Yogyakarta : UNY, 2010), hlm. 20-21.

⁴³Agnes Fitria Susanti, "Negara Indonesia Timur tahun 1946-1950", dalam *Jurnal Avatara e-Jurnal Pendidikan Sejarah* (Vol. 1, No. 3, 2013), hlm. 595.

⁴⁴ANRI, *Inventaris Kesultanan Bima*, No. 36, 10 November 1946. Periksa Pidato WFH. Plas, hlm. 1-2.

akan dipertanggungjawabkan bersama. Sebagai bentuk kerjasama, maka dibentuklah satu *Raad* (dewan perwakilan/wakil rakyat) Bima-Dompo untuk wilayah Sumbawa Timur.⁴⁵

Setelah melakukan pertimbangan atas tuntutan otonomi dan permohonan agar dilantiknya Sultan untuk Dompo. Maka oleh Pemerintah Agung di Makassar pada tanggal 12 September 1947 mengeluarkan keputusan dari hasil perundingan dan mufakat. Keputusan tersebut menyatakan bahwa melalui perwakilannya yakni Residen Timur untuk mengadakan pelantikan *warnemend zelfbestuurder* atau Sultan Dompo. Pada pelantikan ini dihadiri oleh W.F.H Plas (asisten Residen Sumbawa), M. Tajul Arifin Sirajuddin (*Tureli* Dompo), Bahnan Abdul Madjid (*Tureli* Adu), Majelis Kesultanan Dompo yang terdiri dari *Jeneli, Bumi, Rato, gelarang* dan lain-lain. Selain itu hadir pula hadat dan hukum serta Majelis Islam Kesultanan Dompo.⁴⁶

D. KESIMPULAN

Masuknya Islam di Kerajaan Dompo sekitar tahun 1520-an dengan Sultan pertamanya bernama Sultan Syamsuddin bergelar *Mawa'a Tunggu*. Penyebaran Islam di wilayah Dompo melalui para pedagang serta para mubalig. Kesultanan Dompo memiliki wilayah yang cukup besar, sehingga membuat perekonomian kesultanan ini bergantung pada kondisi alam seperti: pada sektor pertanian, peternakan, hasil hutan dan hasil laut. Kekuasaan Hindia-Belanda di Kesultanan Dompo disebabkan karena adanya penandatanganan Perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Perjanjian Bongaya merupakan kekalahan Sultan Hasanuddin (Gowa-Tallo) terhadap VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*), yang membuat Kolonial berhasil memperluas kekuasaannya di wilayah Timur Nusantara termasuk Kesultanan Dompo.

Pada masa Pemerintahan Hindia-Belanda perjanjian antara VOC dan Kesultanan Dompo dilanjutkan dengan kontrak politik panjang. Kontrak ini harus diperbaharui oleh setiap raja/sultan yang memerintah, maka pada tahun 1871 Kesultanan Dompo telah terikat dalam

kontrak politik panjang dengan Belanda yang kontrak ini ditandatangani oleh Sultan Abdullah II. Kebijakan dalam kontrak politik panjang di Kesultanan Dompo mendapat tanggapan dari Sultan Muhammad Sirajuddin yang memerintah tahun 1886-1934. Tanggapan tersebut sultan tunjukkan ketika telah menandatangani kontrak politik tahun 1886, sultan menanggapi kontrak politik ini dengan tidak pernah mematuhi segala isi kontrak tersebut. Sikap sultan ini membuat Belanda memperbaharui kembali kontraknya tanggal 31 Desember 1905. Dalam kontrak ini Belanda mencantumkan beberapa pasal seperti: pengaturan pajak dan pengakuan kekuasaan Belanda di Dompo.

Reaksi sultan ini merupakan bentuk perlawanan, terhadap kebijakan politik Belanda. Akibat penentangan Sultan Muhammad Sirajuddin menimbulkan ketegangan dengan Belanda sehingga mengatasi ini, Belanda memakai strategi politik *divide et impera* agar dapat menaklukkan sultan dan menguasai Kesultanan Dompo. Dalam pelaksanaannya strategi ini berhasil menurunkan Sultan Muhammad Sirajuddin dari tahtanya dengan mengasingkan sultan dan kedua putranya ke Kupang tahun 1934. Keadaan ini berlangsung sampai diangkatnya Muhammad Tajul Arifin Sirajuddin sebagai pejabat sementara Kesultanan Dompo tahun 1939. Akibat keadaan pemerintahan Dompo yang tidak ada kepastian ini oleh Jepang di tahun 1942 digabungkan dengan pemerintahan Kesultanan Bima.

Pergabungan disebabkan karena adanya kekosongan kepala pemerintahan di Dompo. Hal ini berlangsung sampai periode Kemerdekaan, namun ketika Belanda datang kembali tahun 1946 Dompo mempunyai kesempatan untuk menuntut hak otonominya melalui NIT (Negara Indonesia Timur) yang dibentuk oleh Belanda. Upaya Dompo untuk memiliki otonominya kembali itu berlandas pada konsep bekerja sama dengan Bima yang dinilai tidak menguntungkan. Sehingga para *Raad* dari Dompo mengajukan permohonan agar Kesultanan Dompo dapat berotonomi kembali. Pada tanggal 12 September 1947 oleh pemerintah NIT menanggapi permohonan tersebut dengan melantik Sultan Dompo yakni Muhammad Tajul Arifin Sirajuddin dan mengembalikan kekuasaan otonomi penuh untuk Kesultanan Dompo.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip:

⁴⁵*Ibid*, Verlag Singkat, hlm. 1-2.

⁴⁶Kaharul Zaman, *Riwayat Kesultanan Dompu Setelah Tahun 1934*, (Mataram: Nahani Persada, 2007), hlm. 96-100

ANRI, *Kontrak-kontrak Raja-raja di Nusantara dengan Pemerintahan Hindia- Belanda*, No. 300, tahun 1886.

ANRI, *Kontrak-kontrak Raja-raja di Nusantara dengan Pemerintahan Hindia-Belanda*, No. 304, tahun 1905.

Arsip Kesultanan Bima, Surat Perjanjian antara Kesultanan Bima dan Pemerintahan Dai-Nippon. 5 September 2602.

ANRI, *Inventaris Kesultanan Bima*, No. 36, 10 November 1946.

Buku:

Ardhana, I Ketut, *Penataan Nusa Tenggara pada masa Kolonial 1915-1950*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Chaidir, Muhammad, *Kronik Dompo: Catatan Sejarah Dompu*, Dompu: Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Dompu, 2008.

Fachrir Rahman, M., *Islam di Nusa Tenggara Barat: Proses Masuk dan Penyebarannya*, Mataram: Alam Tara Learning Institute, 2012.

Gede Agung, Ide Anak Agung, *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1985.

Hasan, Abdul Malik, *Memikirkan Makna Dompu dalam Rangka Mencari Identitasnya: sebuah refleksi hermeneutik*, Yogyakarta: Yayasan Nuansa Nusa, 2008.

Hilir Ismail, M., *Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara*, Mataram: Lengge, 2004.

Jamaluddin, Yusuf, *Usulan Muhammad Sirajuddin menjadi Calon Pahlawan Nasional*, Dompu: tidak diterbitkan, 2014.

Juridin, Syarifuddin, *Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima* Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2012.

Lamusiah, Siti, "Estetika Budaya Rimpu Pada Masyarakat Bima", *Jurnal Media Bina Ilmiah*, Vol.7, No. 3, 2013.

Muslim, Khaerul, *Dou (Manusia) Dompu*, Mataram: Yayasan Suara Alam, 2001.

_____, *Nasionalisme Sultan Muhammad Sirajuddin "Manuru Kupang"* Mataram: Makalah Seminar Budaya tentang Usulan Pahlawan Nasional, 2013

Nuryahman, "Pendudukan Jepang di Bima pada tahun 1942-1945", *Jurnal Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional*, Vol. 7, No. 26, 2007.

Nuryahman, dkk, "Perjuangan Sultan Muhammad Sirajuddin menentang Belanda di Dompu tahun 1886-1934", dalam *Jurnal Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional*, Vol. 10, No. 32, 2009.

Pangeran, Kisman, *Dari Kontrak Panjang hingga Musnahnya Istana dari Rakyat: Kisah Sultan Muhammad Sirajuddin menentang Kompeni*, Bogor: Morinawa, 2013.

Panji, Teguh, *Kitab Sejarah Terlengkap Majapahit*, Yogyakarta: Laksana, 2015.

Pranoto, Suhartono W, *Teori & Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Raba, Manggaukang, Wijaya, Mars Anshory, *Dompu: Dulu, Kini dan Esok* Dompu: Pemerintah Kabupaten Dompu, 2002.

Ruslan, Muhammad, *Prespektif Kebangkitan Kesultanan Dompu*, Dompu: Yayasan Kesultanan Dompu, 2017.

Sagimun, *Sultan Hasanuddin Menentang V.O.C* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986.

Salahuddin, Siti Maryam R, *Tenunan dan Wanita Bima*, Mataram: Lengge, 1997.

_____, *Selintas Sejarah Pulau Sumbawa*, Bima: Makalah pada Dialog Kesejarahan Dalam Rangka Lawatan Sejarah Sumbawa-Bima, 2003.

_____, *Sejarah Pemerintahan Adat Kesultanan Bima*, Bima: Yayasan Museum Sampraja, 2014.

di Dompu”, *Skripsi*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1986.

Surat Kabar:

Saleh, M., *Sekitar Kerajaan Dompu*, Dompu: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu, 1985.

Bataviaasch Nieuwsblad, 28 Februari 1934

Saleh, Nurdin, Jamaluddin, M. Yusuf, dkk., *Dompu Selayang Pandang: tempo dulu, sekarang dan cita-cita mendatang*, Dompu: KNPI Dompu, 1984.

Kaharul Zaman, “Sosok Keperkasaaan Sultan Muhammad Sirajuddin sebagai seorang Syuhada Dompu”, *KILAS*, 10 Maret 2009.

Suryanto, Agus, *Sejarah Kabupaten Dompu 11 April 1815*, Dompu: Pemda Kabupaten Dompu, 2013.

Internet:

Susanti, Agnes Fitria, “Negara Indonesia Timur tahun 1946-1950”, *Jurnal Avatara e-Jurnal Pendidikan Sejarah* Vol. 1, No. 3, 2013.

Perdagangan Budak di Nusa Tenggara Sampai Pada Abad ke-19, <http://www.geocities.ws/konferensinasionalsejarah/nuryahman.pdf>, diakses 08 Agustus 2018.

Yamin, Muhammad, *Gajah Mada: Pahlawan Persatuan Nusantara*, Jakarta: Balai Pustaka, 1972.

BIODATA

Zaman, Kaharul, *Riwayat Kesultanan Dompu Setelah Tahun 1934*, Mataram: Nahani Persada, 2007.

Nama : Rivaldi Apryanto
Tempat Tanggal Lahir : Dompu, 20-04-1996
Dr. Miftahuddin, M.Hum
NIP. 19740302 200312 1 006
Riwayat Pendidikan : SDN 1 Dompu
SMPN 4 Dompu
SMAN 1 Dompu

Skripsi dan Tesis:

Awalin, Rahmatul, “Negara Indonesia Timur tahun 1946-1950”, *Skripsi*, Yogyakarta: UNY, 2010.

Ilyas, Muhammad, “Reaksi Kesultanan Dompone terhadap Politik Kolonial Belanda”, *Tesis* Yogyakarta: Pascasarjana UGM, 2012.

Ridwan, M, “Sejarah Masuknya Islam dan Perkembangannya dalam masa Kesultanan